

# KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Candra Agung Laksono<sup>1</sup>, Isrok<sup>2</sup>,  
Siti Hamidah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898,  
Fax. (0341) 566505.  
Email: candramorron@yahoo.com

## **Abstract**

*Polygamy marriage often creates legal uncertainty regarding joint property as possible first wife who accompanied first obtaining property section less than a second wife, third, or fourth. So that raises the question of whether the joint property in polygamous marriages in Indonesia against the principle of fairness. The purpose of this paper is to analyze the legal certainty of common property in a polygamous marriage in Indonesia. The method used in the writing of this journal is a normative legal research methods, with use the approach of legislation. Based on these results, there is a conflict of norms of Article 94 paragraph 2 of the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 154 of 1991 on the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 1991 with the principle of Justice. That it concluded that Article 94 paragraph 2 of the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 154 of 1991 on the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the compilation of Islamic law does not provide legal certainty, because it is not logical and can not accommodate the protection of property with his wife who was brought in by her husband's second marriage.*

**Keywords:** marriage, polygamy, treasure together

## **Abstrak**

Perkawinan poligami seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai harta bersama karena dimungkinkan istri pertama yang menemani terlebih dahulu mendapatkan bagian harta sedikit daripada istri yang kedua, ketiga, maupun yang keempat. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat ketidakpastian hukum Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dengan asas Kepastian hukum. Sehingga ditarik simpulan bahwa Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam belum mencerminkan kepastian bagi istri pertama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum Islam dan belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi harta bersama istri yang dibawa dalam perkawinan kedua oleh suaminya. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan Agama, Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

**Kata kunci:** perkawinan, poligami, harta bersama

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi ” Indonesia adalah negara hukum ”, oleh karena itu Indonesia mengatur segala hal termasuk Perkawinan. Dikarenakan kompleksnya masalah perkawinan maka dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Subekti dalam sebuah bukunya menyatakan, perkawinan sesungguhnya merupakan sebuah perjanjian.”<sup>4</sup> Dalam perkawinan terhadap asas yang sangat penting dan menarik untuk dikaji, yakni asas monogami, dimana laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan sebaliknya.

Asas monogami bersifat terbuka atau dalam artian tidak mutlak. Poligami dalam hukum Islam dibenarkan, dan diberikan tempat khusus yang diatur dalam peraturan perundangan.

Meskipun poligami diberikan tempat dalam peraturan perundangan bukan berarti poligami dijadikan asas atau sesuatu yang mendasar dalam undang-undang perkawinan, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami merupakan pengecualian saja, yang diberikan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya diperbolehkan.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan jalan untuk penyatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang sebelumnya hidup sebagai individu, begitu

---

<sup>4</sup>R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermassa, Jakarta, 1987, hlm. 1.

perkawinan sudah dilakukan maka, individu-individu tersebut memikirkan tujuan visi misi dari keluarga secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami sebagaimana dimaksud di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria mempunyai seorang istri begitu sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perkawinan menyarankan perkawinan monogami.

Meski asas monogami merupakan bagian UU Perkawinan, akan tetapi undang-undang memberikan pengecualian bagi umat muslim. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Suami yang akan mengajukan poligami, wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (kompetensi relatif pengadilan agama) (Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain perihal di atas, suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan):

- a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan).

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

Menurut KHI, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).

Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI)

- a. adanya perjanjian istri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

Pasal 58 KHI di atas juga merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), yang mengatakan bahwa:

”persetujuan dari istri atau istri-istri (jika sebelumnya pernah poligami) dapat diberikan secara tertulis oleh istri atau dengan lisan dimuka pengadilan, tetapi sekalipun dilakukan dengan persetujuan tertulis, harus dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang di Pengadilan “

Sesungguhnya dalam peraturan sudah diatur, bahwa apabila istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk poligami, Pengadilan Agama dapat

menetapkan tentang pemberian izin setelah menggali permasalahan yang ada, memeriksa dan mendengar keterangan kedua belah pihak, dan terhadap penetapan tersebut pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan banding(Pasal 59 KHI).

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

”Apabila Pengadilan berpendapat bahwa terdapat cukup alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundangan bagi pemohon untuk berpoligami, maka Pengadilan agama memberikan putusannya berupa izin untuk poligami”.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan, dengan catatan apabila alasan suami telah memenuhi alasan alternatif dan kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kedudukan izin untuk berpoligami bagi suami menurut ketentuan peraturan perundangan di atas baik Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975 di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari pihak istri pertama, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum positif.

Persetujuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dipertegas oleh Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

“Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan Pengadilan.”

Kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975, yaitu : Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja
- ii. Surat keterangan pajak penghasilan
- iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan. Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

Ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau perjanjian dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan Surat An-Nisa:3, yaitu yang menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Cuma Surat An-Nisa: 3 tidak merinci persyaratan dengan kata-kata yang luas cakupannya, yaitu:

"Dan jika kamu merasa takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi yaitu dua, tiga atau empat “

Dari serangkaian ketentuan peraturan di atas syarat untuk poligami sangat susah untuk dilakukan dan dipenuhi antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974. dipertegas oleh Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan) dan ketentuan terkait poligami yang lain. Mengingat harus memiliki izin dari istri yang pertama atau isteri-isteri (apabila sudah berhasil melakukan poligami terlebih dahulu). Sesungguhnya, sangat sulit bahkan nyaris tidak mungkin seorang istri merelakan suaminya untuk dibagi dengan perempuan lain. Seorang perempuan khususnya isteri wajib dilindungi dari perlakuan semena-mena dari suami yang akan melakukan poligami.

Terkait dengan harta bersama dalam perkawinan Poligami diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan:

“dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing- masing isteri.”

Dan di pertegas kembali dalam Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, yang menyebutkan:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, Pasal 94 ayat (1).

“pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat “

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 di atas, sebetulnya tidak memberikan keadilan terhadap istri pertama, karena dimungkinkan isteri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada isteri kedua, ketiga atau keempat.

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan asas-asas hukum dan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Kasus kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami yang pernah dialami oleh Teguh ( bukan nama sebenarnya ), umur 44 tahun dan Putri ( bukan nama sebenarnya ), umur 38 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 16 Juni 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/33/VI/1993, tertanggal 16 Juni 1993. Pada bulan Januari tahun 2008 Teguh berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Endryani dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi dan meminta untuk izin berpoligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal dikarenakan istri tergolong tipe gila kerja dan sering kecapekan kerja.

---

<sup>6</sup>Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

Dengan adanya hubungan tersebut Teguh telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Putri dan keluarganya dan pihak Putri dan keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon istri kedua Teguh juga sudah sering ketemu dengan Putri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Teguh mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan Endryani, umur 38 tahun. Teguh menyatakan sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya kelak setiap harinya dimana Teguh tersebut mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah). Hal ini pernyataan terlampir dalam surat permohonan izin poligami dan Putri dan Endryani masing-masing bersedia untuk dimadu Teguh sebagaimana surat kesediannya juga terlampirkan. Teguh dan Putri selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut : ( a ). 5 unit Toko; ( b ) Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang; ( c ) Dan semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Teguh dan Putri.

Perkara tersebut diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam putusan nomor : 1374/Pdt. G/2008/PA.Kab.Mlg. Dalam Putusannya hakim mengabulkan permohonan Teguh dan mengizinkan Teguh menikah lagi dengan Endryani serta menetapkan harta bersama Teguh dan Putri.

Berkaca pada latar belakang di atas terdapat pertentangan norma, Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dengan Teori Keadilan. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam tidak memberikan kepastian hukum, karena dimungkinkan isteri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada isteri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan isteri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik peneliti untuk menuangkan dalam bentuk karya tulis tesis berjudul: “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” Dengan Perumusan



Masalah : Bagaimana kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam dan Perlindungan hukum bagi istri pertama berdasarkan kompilasi hukum islam

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan memaparkan peraturan perundang-undangan yang mencakup : Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan atau hukum positif, Penelitian terhadap asas-asas hukum dan Penelitian terhadap teori teori hukum. Untuk menganalisa permasalahan di atas peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) . Peraturan sebagaimana dimaksud adalah, Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomer 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden nomer 1 tahun 1991 dengan asas kepastian hukum.

### **Pembahasan**

#### **A. Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa' (4) ayat 3 memberikan kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalam implementasinya, nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Sudah barang tentu, praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat didasari oleh i'tikad baik dan tujuan yang tulus.

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2). Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undang-undang, pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu :

1. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat (2) disebut dengan syarat alternatif, karena untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tidak mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disebutkan undang-undang, dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah memberi hak kepada suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedangkan syarat kedua yang ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif karena untuk dapat diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligami dan secara normatif memungkinkan adanya harta bersama dalam perkawinan poligami, akan tetapi dalam beberapa kitab fiqh klasik tidak didapatkan pembahasan harta bersama. Hal ini karena kuatnya struktur sosial masyarakat Timur Tengah yang bercorak patriarkhi, sehingga tidak memberi peluang bagi perempuan in casu istri untuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami atau istri)

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.
2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Sebagaimana yang menjadi pandangan mazhab sosiological jurisprudence, positivasi hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku dan ketinggalan zaman sejak hukum tersebut dinyatakan berlaku. Untuk itu, hukum membutuhkan pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika berhadapan dengan suatu kasus.

Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkan sentuhan nilai agar hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuah kasus (case law) bentuk law in action. Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hakim, dalam putusan pengadilan (yurisprudensi).

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redburch hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu asas kepastian :

a) Kepastian

Hukum harus memiliki kepastian yang mengikat terhadap seluruh rakyat, hal ini bertujuan agar seluruh rakyat mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

Dari penjelasan ketiga asas tersebut Penulis gunakan sebagai kerangka teori untuk menilai pengaturan harta bersama yang diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara garis besar menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal ini menurut penulis telah sesuai yang mengedepankan kepastian hukum. Asas kepastian hukum telah memenuhi asas kepastian karena

dijelaskan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan harta bersama menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 menjadi jelas, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibawah penguasaan masing-masing yaitu suami dan istri dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

## **B. Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibatkan pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel. Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan. Mengingat Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama untuk dijalankan. Maka tidak disalahkan syirkah abdan di jalankan di Indonesia.

Menurut Penulis, masalah harta bersama ini merupakan persoalan Ijtihadiyah yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama fiqh. Sehingga untuk menggali hukum mengenai harta bersama diperlukan ijtihad yang berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an yang merujuk pada masalah harta bersama.

Harta bersama dihasilkan dari perkongsian suami isteri yang disebut dengan syirkah. Cara terjadinya syirkah yaitu dengan cara tertulis atau ucapan nyata-nyata serta dengan penentuan undang-undang. Syirkah antara suami isteri dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami isteri itu. Cara ini memang hanya khusus untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama dalam masa perkawinan. Diam-diam telah terjadi syirkah itu, apabila kenyataan suami isteri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak selalu diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Memang hal itu adalah yang pertama dan yang terutama. Tetapi di samping itu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini dalam soal kebendaan dan harta kekayaan, banyak pula tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami dan isteri.

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, Pasal tersebut menyebutkan:

“pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dapat dipecah unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. pemilikan harta bersama
2. dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (Poligami)
3. dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dapat disimpulkan kepemilikan harta bersama dengan istri-istrinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah harta bersama atau pekongsian harta antara suami istri tidaklah diatur secara implisit di dalam al-qur'an, namun hal ini di perbolehkan. Menurut mazhab Imam Syafi'i perkongsian antara harta suami dan istri tergolong dalam syirkah abdan dan syirkah mufawadah.

Pengaturan mengenai perkongsian antara harta suami dan istri di atas adalah diperbolehkan selama mencerminkan sebuah keadilan. Yusuf Qardhawi berpendapat Keadilan menurut islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.

Karena penelitian ini di tinjau juga dari hukum islam maka penelitian ini mengacu pada hukum islam. Keadilan menurut islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.

Keadilan menurut islam terkait perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami. Keadilan harus diberikan pada istri-istrinya segala sesuatu yang menjadi haknya, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak istri-istri yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita memahami bahwa pada perinsipnya syari'at Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, dengan syarat keadilan,

kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.

Poligami Dalam Prospektif Perundang-Undangan Dengan memperhatikan beberapa dasar hukum yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya persoalan poligami di Indonesia, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, termasuk KHI, maka penulis sangat optimis dan berkeyakinan bahwa prospek poligami itu semakin baik, dan terbuka kemungkinan berpoligami bagi yang berkemampuan dan memiliki niat yang ikhlas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Kemudian yang menarik disimak adalah salah satu persyaratan dalam berpoligami adalah adanya persetujuan isteri, dalam pasal 59 KHI disebutkan bahwa dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa, mendengar isteri yang bersangkutan di Pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

Melihat dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan, “dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.” Dan di dalam Pasal 94 ayat 2 menyebutkan:

“pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 94 di atas, sebetulnya tidak jelas, atau terdapat kekaburan makna. Pertanyaan berikut setidaknya dapat mewakili kekaburan makna sebagaimana dimaksud di atas:

“Apakah setelah terjadinya akad pernikahan kedua dari seorang suami, istri pertama yang di poligami masih dapat bagian dari harta bersama untuk masa

hidupnya bersama suami dan istri keduanya, sedangkan perlu diketahui pula seorang suami masih hidup bersama-sama dengan kedua istrinya?”Apakah hal ini adil menurut hukum positif.Dan bagaimana seharusnya pengaturan di tegakan di dalam hukum positif.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan: hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud diatas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas.

Kaitannya dengan pembagian harta bersama di atas sebenarnya tidak memenuhi unsur keadilan.Bagaimana mungkin seorang istri yang masih menjalani pernikahan dengan suaminya serta merelakan suaminya untuk berpoligami mengenai pembagian harta bersama berhenti sampai saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.Belum lagi mengenai harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami. Hal ini sama saja mengambil harta istri.

Di dalam KHI sebenarnya sudah diatur terkait harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami, yakni dalam Pasal 92 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, sebagai berikut:

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Sangat disayangkan dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai sanksinya.Sebagai upaya optimalisasi peraturan seharusnya terdapat sanksi yang mengatur secara tegas.

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan pembagian harta bersama untuk istri-istri yang dipoligami.Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempatkalinya.Jadi proposisi pembagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri



kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari keempat.

Alasan penulis membuat pembagian seperti tersebut di atas adalah agar istri-istri yang dipoligami tetap mendapatkan haknya, karena istri-istri yang dipoligami tersebut merelakan suaminya untuk berpoligami, dimana hal tersebut untuk dilakukan adalah sangat berat. Jadi, Penerapan pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud di atas adalah jauh lebih adil dari pada pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991.

Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan simpel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telah memeberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima
- b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
- c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh

suami bersama istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga kedua dan istri pertama.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami.

Untuk hal itu, ajaran agama Islam pun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

### **C. Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1374/ Pdt. G/2008/P.A. Kab. Mlg.**

#### **Proses Hukum**

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam Posisi Kasus tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan izin poligami serta menetapkan harta bersama dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kota Malang Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 10 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Endryani
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum
5. Dan apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan di lapangan harta-harta tersebut diatas termasuk harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon.

Dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri ( termohon ) mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami ( pemohon ) dan istri terdahulu (termohon)

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami perkara nomor 1374/ Pdt. G/2008/PA.Kab. Mlg. Yang berada pada kedua belah pihak ( pemohon dan termohon ) dan menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri kedua tidak mempunyai hak atas harta tersebut. Sehingga harta tersebut hanya dimiliki Pemohon dan Termohon, dimana harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung yang dialami oleh Pemohon dan Termohon. Apabila istri kedua berhak memiliki harta tersebut, maka Termohon berhak dan patut untuk menuntut kembali.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan member izin berpoligami kepada Pemohon ( suami ) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam, dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum yaiitu sudah dijelaskan bahwa harta istri pertama menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak atau hak-haknya, sehingga harta istri pertama tersebut sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam

Menurut ketentuan dan Undang-undang tentang kepemilikan harta bersama terkait secara langsung terhadap pasangan suami dengan istri-istrinya yaitu ketentuan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami, berbeda dengan perkawinan monogami yang diatur secara tegas dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan poligami dengan keterkaitannya dengan harta bersama diatur secara khusus di dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Aturan khusus tersebut berkenaan dengan 2 ( dua ) pokok persoalan, yaitu :

- a. Harta bersama seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dengan maksimal empat orang kedudukannya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama sebagaimana tersebut terhitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan kedua dan seterusnya sampai dengan keempat.

Bahwa yang dimaksud terpisah dan berdiri sendiri yaitu harta bersama dengan istri pertama harus ditetapkan tersendiri dan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak boleh diganggu harta istri pertama tersebut, demikian pula jika suami menikah lagi ( poligami ) dengan istri ketiga, maka harta suami istri pertama dan kedua harus pula ditetapkan. Begitu juga bila suami tersebut mau menikah lagi ( poligami ) dengan istri keempat, maka harta bersama istri pertama, kedua, dan ketiga harus ditetapkan juga.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa kedudukan harta bersama dalam perkara izin poligami menjadi jelas, bahwa harta istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat harus terpisah dan berdiri sendiri, sehingga dikemudian hari tidak ada pihak ( istri ) yang dirugikan dalam masalah harta bersama ini

#### **A. Perlindungan Hukum Pada Istri Pertama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum.

Philipus M hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk setelah terjadinya sengketa.

Pada dasarnya percampuran harta kekayaan atau harta bersama bukan merupakan suatu masalah apabila terjadi kesepakatan antara suami dan istri. Sengketa harta bersama ini akan timbul apabila terjadi perselisihan antara suami istri atau suami yang berpoligami. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan poligami, dimana masing-masing istri atau masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama, atau pihak istri pertama merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam kepemilikan harta bersama.

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi istri pertama akibat perkawinan poligami suami terkait harta bersama. Berikut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu berupa perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya preventif dan sita jaminan atas harta bersama sebagai bentuk upaya represif.

#### 1. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian ini dibuat atau sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan disahkan oleh pegawai kantor urusan agama ( KUA ) bagi yang beragama islam dan dapat dilakukan dihadapan notaris.

Perjanjian perkawinan dinyatakan sah selama tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum, kesusilaan, agama. Perjanjian perkawinan termasuk kepemilikan harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur di dalam pasal 47 kompilasi hukum islam yaitu :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya preventif bagi istri pertama agar mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi sangat penting dilakukan untuk menghindari perselisihan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dan mencegah ketidakadilan bagi istri pertama atas harta bersamanya.

## 2. Sita Jaminan

Sita jaminan atas harta bersama pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi harta yang diperoleh selama perkawinan. Secara hukum, sita jaminan hanya dapat diberlakukan terhadap harta bersama suami dan istri apabila terjadi sengketa pembagian harta bersama. Hal ini diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 95 yaitu :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

## Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami untuk istri pertama ditinjau dari 3 sumber hukum yaitu Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan putusan pengadilan agama. Hanya kompilasi hukum islam saja yaitu pasal 94 kompilasi hukum islam yang belum mencerminkan kepastian pada istri pertama karena dimungkinkan dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada istri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami

tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta bersama.

2. Perlindungan hukum pada istri pertama atas masalah harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditempuh dengan cara upaya yang bersifat preventif yaitu dengan perjanjian perkawinan dan upaya yang bersifat represif yaitu dengan sita jaminan atas harta bersama suami dengan istri. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami yang dapat merugikan istri pertama dalam perkawinan poligami. Sehingga pembuktian harta bersama dalam perkawinan poligami suami dapat dilihat pada putusan pengadilan agama tentang penetapan harta bersama bagi istri pertama yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Azhar Basyir, 1996, **Hukum Perkawinan Islam**, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang.
- Abdul Wahab Khallaf, 2002, **Kaidah-kaidah Hukum Islam**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1986, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum**, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- H. Sulaiman Rasyid, 1954, **Fiqh Islam**, Attahiriyah, Jakarta.
- H. Zahry Hamid, 1978, **Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam**, Bina Cipta, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung.

### Peraturan perundang-undangan

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang **Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, Pasal 94 ayat (1)**.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang **Perkawinan**.
- Putusan Pengadilan Agama Kab.Malang **Nomor 1374/ Pdt. G/2008/PA.Kab. Mlg.**



**KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**JURNAL**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
( M.Kn. )



Oleh:

**CANDRA AGUNG LAKSONO,SH**  
NIM. 12601020011034

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**